

Proses Penyusunan APBN KKP 2016

LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA

“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga *jalesveva jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana”.

Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014



TRISAKTI & NAWA CITA



VISI KKP

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang **mandiri, maju, kuat** dan **berbasis kepentingan nasional**

3 PILAR MISI KKP

- 1 Kedaulatan
- 2 Keberlanjutan
- 3 Kesejahteraan

Feb 2015 <

- Pada finalisasi anggaran 2015, anggaran untuk prioritas yang telah disusun tidak sesuai dengan arahan Menteri karena hanya mengikuti tupoksi per eselon I (proposisi ke masyarakat menjadi rendah).
- Untuk 2016 diminta agar anggaran tidak lagi seperti 2015 akan tetapi mengikuti pola yang telah dialokasikan Menteri
- Contoh:
 - Ditjen Perikanan Tangkap: Pembangunan pelabuhan 41%, sementara kapal & alat tangkap 18%
 - *Stakeholder* Ditjen Perikanan Tangkap adalah nelayan, bukan kontraktor. Dengan demikian, proposi harus dibalik
 - Demikian juga untuk Eselon I lainnya

Apr 2015 <

- Penyusunan anggaran sesuai dengan 3 pilar misi KKP dipimpin langsung oleh Menteri
- Arahan Menteri: proporsi 84% konkrit program, 16% aparatur. Menteri meminta semua Eselon I melakukan penelaahan internal terlebih dahulu dan mencoba mencari efisiensi untuk kegiatan yang lebih produktif

> Mei-Jul 2015

- Pembahasan *detail* alokasi per Eselon I: Proporsi *stakeholder* dan aset (67,8%), sisanya untuk belanja pegawai dan kegiatan pendukung
- Penyelarsan harga satuan komponen kegiatan prioritas
- Menteri melakukan konfirmasi :
 - Harga-harga dengan telepon terbuka atas harga terjadi di pasar yang sesungguhnya (mendekati realita harga pembelian pada umumnya)
 - Biaya hari layar untuk standar kebutuhan BBM untuk kapal patroli, cek PK mesin sampai pada ukuran kapal dan ukuran HP mesin kapal patroli
 - Biaya pemetaan dan biaya yang selama ini dilakukan konsultan dilimpahkan ke Balitbang KKP (mengoptimalkan kapasitas internal KKP yang selama ini dilakukan melalui *outsourcing*)
 - Menghitung standar bangunan per meter²
 - Negosiasi ulang semua pinjaman dan hibah luar negeri untuk direalokasi pada kegiatan yang lebih produktif

Agst 2015 <

- Beberapa kali rapat anggaran tampak ada resistensi dan upaya menyembunyikan dengan memasukkan anggaran tidak produktif dalam kalimat rancu
- Solusi: Surat Edaran Menteri kepada seluruh Eselon I untuk larangan penggunaan kata yang tidak jelas dan rancu (misal: pengembangan, penguatan, peningkatan, pemberdayaan, pembangunan, dll, diganti dengan kata: pembelian, pembayaran, biaya, untuk apa (dengan kata konkrit) dan terukur sesuai dengan tupoksi masing-masing



Contoh

- “Pengembangan sarana perikanan tangkap” = pengadaan kapal
- “Penguatan kapasitas SDM” = pelatihan



Rapat di rumah dg es1,2,3 utk renstra 2016. Untk memastikan 2016 tidak boleh seperti tahun2 sebelumnya. Nelayan, pembudidaya, yg utama !!!!

27/06/15 11:52



70% harus digunakan untk Perikanan&kelautan stake holder. Tidak boleh ada lagi Dir.Tangkap annggarannya 41% infrastruktur & alat tangkap 18%

27/06/15 11:56



Memangnya stakeholder KKP / Dir. tangkap itu Kontraktor?kan bukan. Stakeholder KKP/dir. Tangkap adlh Nelayan, pembudidaya, swasta petikanan

27/06/15 11:58

> Sep 2015

- Membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa Terpadu
- Menyusun SOP implementasi program
- Melakukan efisiensi kegiatan pendukung, dialihkan ke kegiatan prioritas/*stakeholders*
- Contoh : perjalanan dinas, seminar, rapat disatukan menjadi seminar nasional

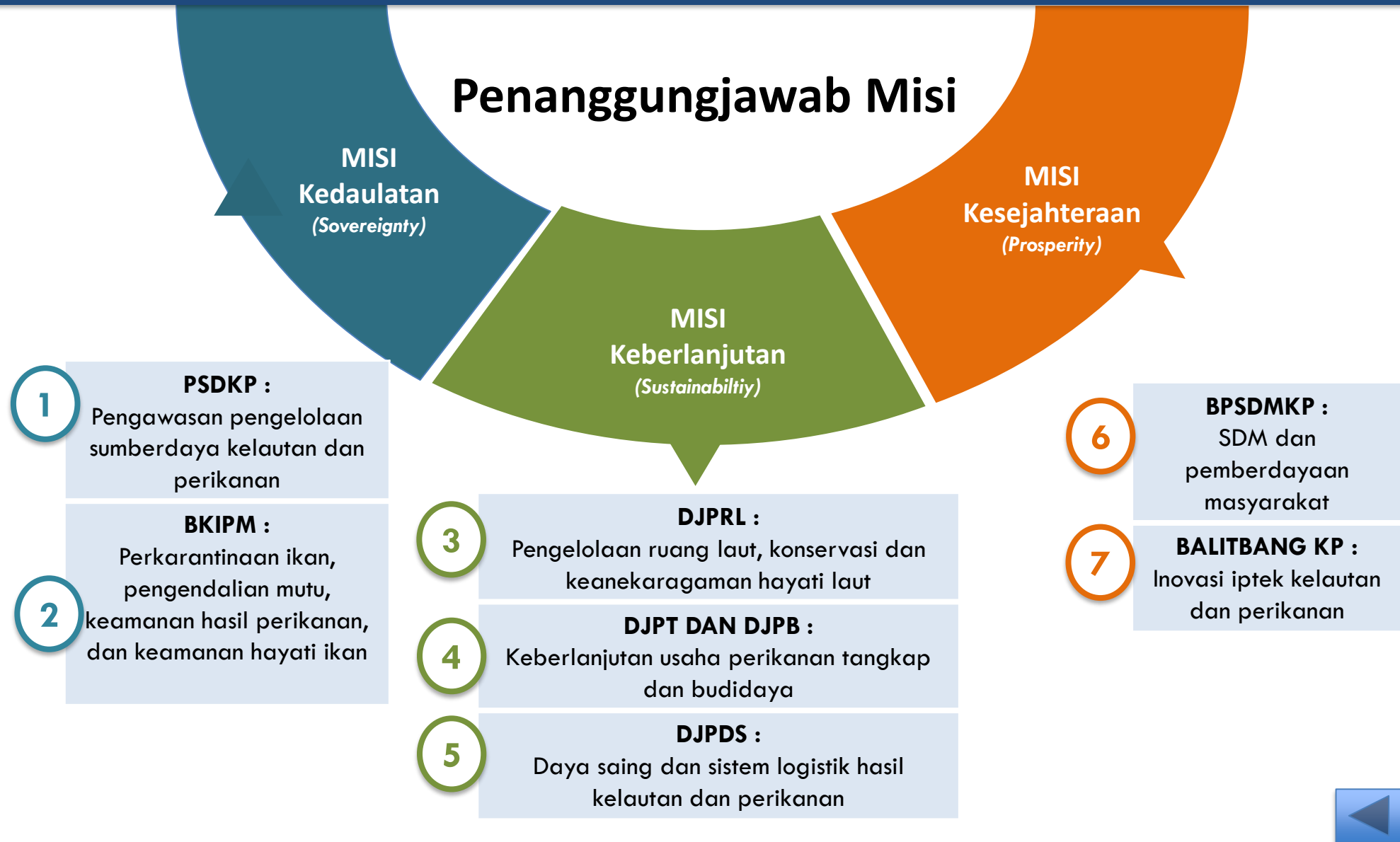
> Nov 2015

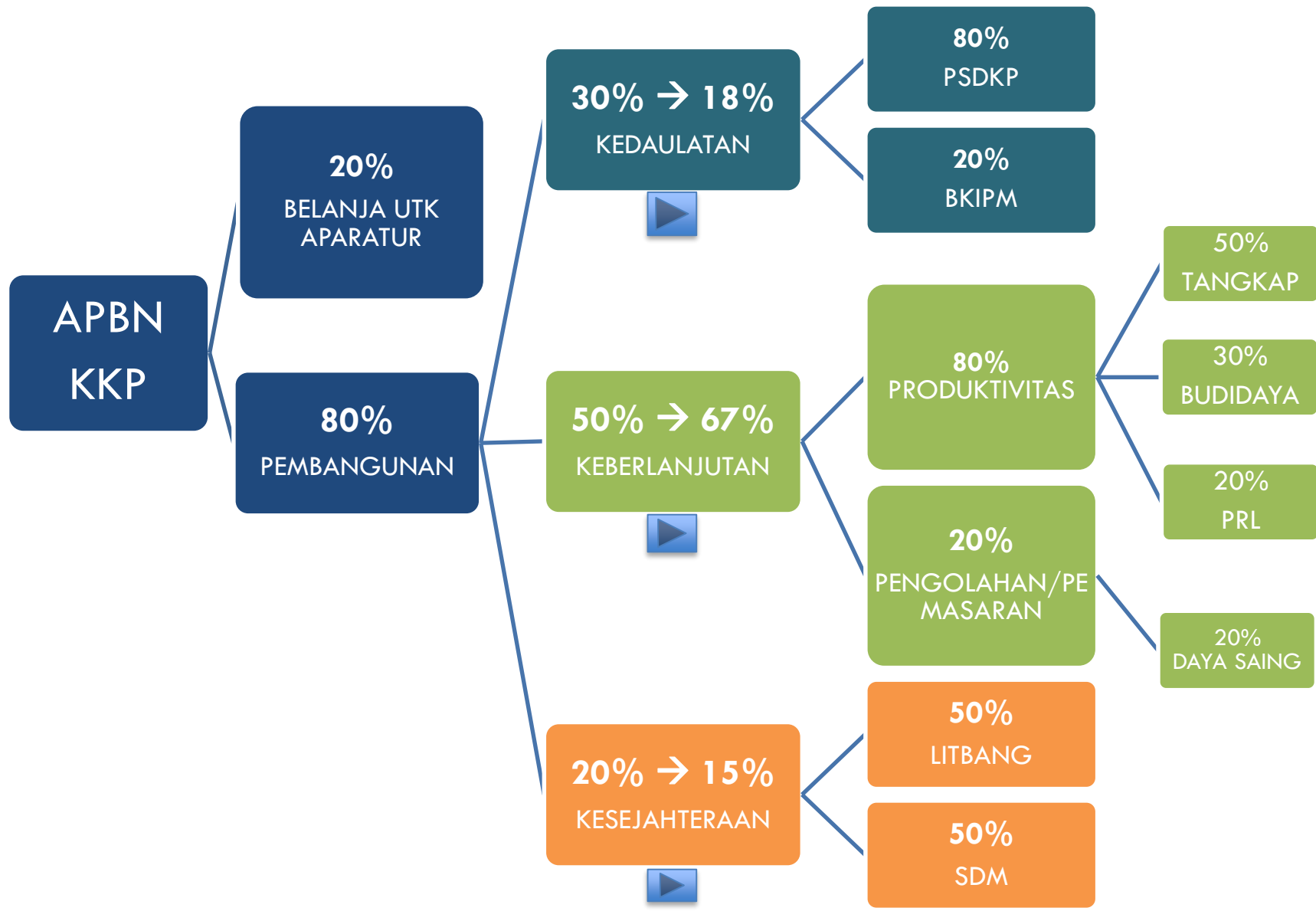
- Pemeriksaan RKA-KL dan rencana revisi akhir

> Des 2015

- Pengecekan ulang penggunaan kata-kata rancu dan anggaran yang tidak tepat











KELUHAN AWAL

Ketakutan dan kekhawatiran akan :

- Tidak ada pekerjaan 
- Pekerjaan terkonsentrasi di satu titik 
- Tidak ada biaya pendampingan 
- Tidak ada tambahan pendapatan 

1. KKP mendapat julukan baru “Kementerian Pengadaan” 😊
2. Organisasi akan lebih ramping minimal 40% (eselon I, II, dan III) 🧚‍♀️
3. Perampingan keseluruhan bisa dimulai 10% tiap tahun, dan revitalisasi 1% rekrutmen PNS baru dari 10% yang dialih fungsikan (penawaran ke jabatan fungsional atau “golden shake hand”) 👍
4. Fokus kegiatan ke daerah ✈️ 🚢
5. Pelaksanaan program lebih sederhana, tepat sasaran, pengawasan jauh lebih mudah 🤞
6. Kenaikan gaji pegawai dan tunjangan kinerja bisa dilakukan
7. *Maintain* pertumbuhan perikanan (PDB) di atas 8% 🙌

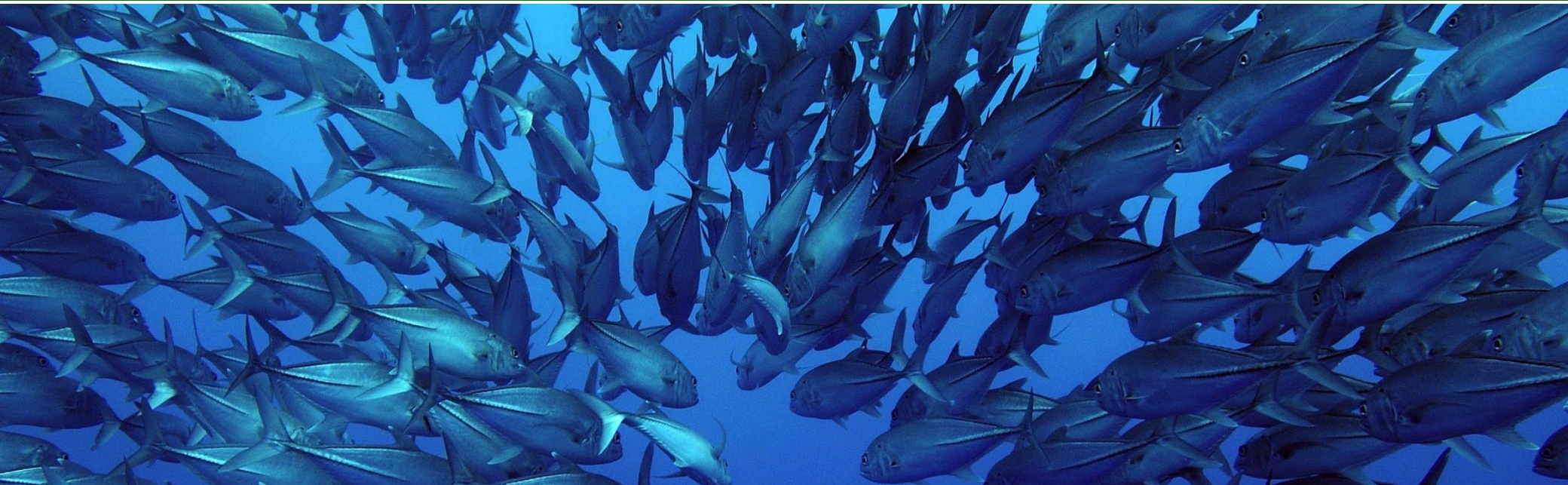
MENUJU
LAUT MASA DEPAN BANGSA
DENGAN
*GOOD GOVERNANCE,
PROFESSIONAL,
AND HAPPY NATION*



Change of Behaviour from Business-As-Usual to :

- *Upload* data konsesi yang dikeluarkan
- *Upload* data rencana anggaran APBN
- *Meeting* dengan semua *stakeholders*, baik “hitam” dan “putih”, secara terbuka, *head-to-head*, komprehensif, detil dan tuntas
- Media dilibatkan di setiap tahapan proses
- Membawa semua persoalan ke rasio dasar, logika, dan nurani
- Bergerak cepat, responsif, tidak menunda bila dapat dikerjakan hari ini
- WA group Eselon 1 dan Menteri
- 24/7 availability
- *Handbook* dengan SOP berbasis sistem check-list
- Bekerjasama dalam basis “kerja sama-sama” dan “sama-sama kerja”
- Bersikap sebagai *executive* (bekerja dan melayani), bukan sebagai *stakeholder* atau *shareholder*
- Bermimpi gaji naik dan tunkin naik untuk meningkatkan kegembiraan





Proses Penyusunan APBN KKP 2016

Sidang Kabinet Paripurna

Bogor, 8 Desember 2015